

Saham syariah sebagai objek wakaf setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf = Islamic shares as waqf related to law no 41 year 2004 on waqf

Helza Nova Lita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20454056&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisasikan keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementerian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran, pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah.

<hr />

ABSTRACT

Poverty is a common problem of many developing countries, including Indonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Among the social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important role in developing social activities, economy, and culture of Islamic societies.

The Government of the Republic of Indonesia has provided support for the development of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf Waqf Act . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can be object waqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice, shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, and how the legal protection for shares as the object of waqf in order to realize distributive justice in society. The method used is a normative legal research. Normative Legal Research is accomplished by approach to law and the concept of justice according to Islamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economic power of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also have a very high social aspect.

Theoretically, waqf goal is to realize social justice. waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects. This is implementation of economic distributive justice according to al Quran Surat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 insists that wealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqf itself is one of system in the distribution of wealth and resources in community. Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with a waqf money is included in the category of moving objects. Proposition used to develop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest. Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah and istishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits for the people. Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can be waqf object. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflict with Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with the supervision by the government through the ministry of religion and Indonesia Waqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhir professional and trustful, registration, announcements and publications, insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement of legal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveries for the development of waqf shares in modern management can be done through synergy with CSR programs developed by companies